



**NASKAH AKADEMIK  
KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM SMK**

**PUSAT KURIKULUM  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
2007**

## ABSTRAK

Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Pusat Kurikulum adalah melaksanakan kajian kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan. Untuk melaksanakan kajian tersebut Pusat Kurikulum telah melakukan serangkaian kegiatan analisis dan kajian yang kemudian disintesis menjadi naskah akademik. Analisis dan kajian tersebut diawali dengan penyusunan desain yang meliputi: 1) Penetapan fokus kajian dan menjangkau informasi yang relevan; 2) Pengkajian dokumen Standar Isi; 3) Diskusi hasil studi dokumen Standar Isi yang melahirkan rekomendasi; 4) Pengkajian pelaksanaan dokumen Standar Isi yang menghasilkan simpulan; 5) Diskusi hasil simpulan dengan para ahli dan pelaksana pendidikan serta para penentu kebijakan untuk menghasilkan rekomendasi; 6) Analisis seluruh hasil kajian dan pelaksanaan dokumen Standar Isi oleh para pakar dan praktisi sehingga menghasilkan simpulan dan rekomendasi tentang dokumen Standar Isi serta pelaksanaannya; 7) Penyusunan Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum SMK.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam kajian ini terdiri dari: 1) para pakar dari perguruan tinggi; 2) pemerhati pendidikan; 3) pejabat dan staf unit utama terkait di Depdiknas; 4) para praktisi lapangan; dan 5) Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas

Berdasarkan hasil kajian terhadap dokumen dan pelaksanaan serta analisisnya, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Kelompok mata pelajaran spesifik SMK meliputi tiga kelompok, yaitu normatif, adaptif, dan produktif. Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai kekhususan yang terletak pada kelompok mata pelajaran produktif. Mata pelajaran produktif ini dikembangkan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Namun, mengingat belum semua program keahlian memiliki SKKNI, perlu upaya sinergis dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) untuk penyusunan SKKNI terkait yang belum terbit.

Berkaitan dengan struktur kurikulum, penambahan mata pelajaran pada kelompok normatif (Seni Budaya) dan pada kelompok adaptif (IPS dan IPA) berdampak pada beban pembelajaran SMK di satu sisi, di sisi lain berkurangnya alokasi waktu untuk mata pelajaran produktif. Oleh karena itu, jam real praktik di sekolah dan di industri harus dihitung dan perlu adanya penambahan lebih dari 4 jam pembelajaran untuk memenuhi pencapaian standar kompetensi lulusan.

Muatan lokal yang dikembangkan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) substansinya lebih berorientasi pada kompetensi kejuruan. Padahal, batasan yang diberikan di dalam Permendiknas lebih bersifat universal dan mengacu pada pengembangan manusia seutuhnya.

Berkaitan dengan pengembangan diri di SMK, hasil kajian dilapangan menunjukkan bahwa Implementasi pengembangan diri masih parsial dan belum terintegrasi dengan program Intra. Untuk itu, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan diri peserta didik melalui antara lain: Mengintegrasikan kedalam setiap mata pelajaran dan atau dalam bentuk SKKS ( Satuan Kredit Kegiatan Kesiswaan).

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global pada SMK dapat dilakukan melalui pengintegrasian semua pelajaran dan dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal. Sebagai contoh, penerapan PLC pada pelajaran Produktif (mata pelajaran kejuruan dari program keahlian kelompok Teknologi Industri) yang dapat mengakomodasi implementasi kompetensi dalam penerapan sistem otomasi kedaerahan dan berwawasan global.

Pendidikan kecakapan hidup berisi uraian tentang penerapan kecakapan akademik, pribadi, sosial, dan kecakapan vokasional. Pada SMK kecakapan akademik, personal, dan sosial diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Kecakapan vokasional diintegrasikan ke dalam mata pelajaran kewirausahaan serta unit produksi, berorientasi kedalam produk dan jasa.

Kebijakan bagi peserta didik yang tidak LULUS UN dapat mengikuti UNPK ( Paket C ), bagi siswa SMK tidak memiliki relevansi dengan mata pelajaran yang dipelajari dan yang diujikan karena ada mata uji yang tidak dipelajari tetapi diujikan. Hal ini tentunya merupakan suatu kebijakan yang IRONIS. Dalam upaya untuk mengurangi dampak tersebut, maka:

- a. Ujian Nasional perlu diselenggarakan 2 x setiap tahun (realisasi PP 19/2005);
- b. POS (prosedur operasi standar) Ujian Nasional perlu diumumkan pada AWAL tahun pelajaran.

## KATA PENGANTAR

Pemberlakuan UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menuntut cara pandang yang berbeda tentang pengembangan dan pelaksanaan kurikulum.

Pengembangan kurikulum yang dilakukan satuan pendidikan diharapkan memberikan keleluasaan sekolah untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan satuan pendidikan.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada standar nasional pendidikan, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dari kedelapan standar isi tersebut, standar isi dan standar kompetensi lulusan merupakan acuan utama dalam pengembangan KTSP. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan .

Pengembangan kurikulum telah dilakukan oleh sebagian satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu pada standar isi.

Pengembangan kurikulum yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar isi perlu ditelaah untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan standar isi tersebut.

Hasil pengkajian antara lain berupa naskah akademik :

1. Kajian Kebijakan Kurikulum SD
2. Kajian Kebijakan Kurikulum SMP
3. Kajian Kebijakan Kurikulum SMA
4. Kajian Kebijakan Kurikulum SMK
5. Kajian Kebijakan Kesetaraan Dikdas
6. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Agama
7. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Kewarganegaraan
8. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa
9. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Matematika
10. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran IPA
11. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran IPS
12. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Keterampilan
13. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Kesenian
14. . Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran TIK
15. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pendidikan Jasmani

Salah satu hasil kajian di atas adalah **Naskah Akademik Kebijakan Kurikulum SMK**. Naskah akademik ini memberikan gambaran tentang kajian pelaksanaan standar isi SMK dan permasalahannya yang digunakan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan.

Pusat Kurikulum menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak erbagai Perguruan Tinggi, Direktorat di lingkungan Depdiknas, Dinas Pendidikan, dan praktisi pendidikan yang telah membantu Pusat Kurikulum dalam menghasilkan naskah akademik ini.

Kepala Pusat Kurikulum

Badan Penelitian dan Pengembangan

Depdiknas,

**Diah Harianti**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	
KATA PENGANTAR .....	
BAB I	PENDAHULUAN.....
	A. Latar Belakang.....
	B. Landasan Filosofis.....
	C. Landasan Yuridis.....
	D. Tujuan.....
	1. Tujuan Umum.....
	2. Tujuan Khusus.....
BAB II	KAJIAN TEORITIS.....
BAB III	TEMUAN KAJIAN DAN PEMBAHASAN.....
	A. Kajian Dokumen (kerangka kurikulum).....
	1. Kelompok Matapelajaran dan Struktur Kurikulum.....
	2. Muatan Lokal (Mulok).....
	3. Pengembangan Diri.....
	4. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global.....
	5. Pendidikan Kecakapan Hidup.....
	6. Ujian Nasional.....
	B. Kajian Lapangan.....
	1. Manajemen Kurikulum.....
	2. Organisasi dan Manajemen Sekolah.....
	3. Ketenagaan.....
	4. Sarana Prasarana.....
	5. Pembiayaan.....
	6. Peserta Didik.....
	7. Peranserta Masyarakat.....
	8. Lingkungan dan Kultur Sekolah.....
	9. Unit Produksi.....
BAB IV	SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....
	A. Simpulan.....
	B. Rekomendasi.....
DAFTAR PUSTAKA .....	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Pusat Kurikulum adalah melaksanakan pengkajian Standar Isi dalam pengembangan kurikulum untuk pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, baik umum maupun kejuruan. Salah satu bagian dari kajian tersebut adalah kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan model-model kurikulum yang menjadi tanggung jawab Pusat Kurikulum. Untuk melaksanakan kajian tersebut perlu dilakukan serangkaian kegiatan, terutama analisis dan kajian kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan yang kemudian disintesis menjadi naskah akademik. Analisis dan kajian tersebut diawali dengan penyusunan desain yang meliputi: 1) Penetapan fokus kajian dan menjaring informasi yang relevan; 2) Pengkajian dokumen Standar Isi; 3) Diskusi hasil studi dokumen Standar Isi yang melahirkan rekomendasi; 4) Pengkajian pelaksanaan dokumen Standar Isi yang menghasilkan simpulan; 5) Diskusi hasil simpulan dengan para ahli dan pelaksana pendidikan serta para penentu kebijakan untuk menghasilkan rekomendasi; 6) Analisis seluruh hasil kajian dan pelaksanaan dokumen Standar Isi oleh para pakar dan praktisi sehingga menghasilkan simpulan dan rekomendasi tentang dokumen Standar Isi serta pelaksanaannya; 7) Penyusunan Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum SMK.

#### **B. Landasan Filosofis**

Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat Indonesia dengan laju pembangunannya masih menghadapi masalah pendidikan yang berat, terutama berkaitan dengan kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan.

Mentalitas sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama pada masyarakat agraris, dengan ketertinggalannya sebagai akibat penjajahan, belum mendukung tercapainya cita-cita pembangunan nasional. Berbagai kekurangan dan kelemahan mentalitas masyarakat Indonesia tersebut antara lain: suka melakukan terobosan dengan mengabaikan mutu, kurang rasa percaya diri, tidak berdisiplin murni, tidak berorientasi ke masa depan, dan suka mengabaikan tanggung jawab tanpa rasa malu. Terdapat ciri-ciri manusia Indonesia yang menghambat, yaitu hipokrit atau munafik, segan dan enggan bertanggungjawab atas perbuatannya, putusannya, kekuatannya, pikirannya, berjiwa feodal, percaya pada takhayul, boros, lebih suka tidak bekerja keras kecuali kalau terpaksa, ingin cepat kaya, berpangkat, cepat cemburu, dengki dan tukang meniru. Di samping itu terdapat kelemahan lain yang kurang menunjang pembangunan.

Menghadapi kondisi masyarakat Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, pembangunan pendidikan merupakan suatu keharusan dan amat penting untuk dilakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pendidikan nasional di negara kita dewasa ini sedang dihadapkan pada empat krisis pokok, yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan

manajemen. Sedikitnya ada enam masalah pokok sistem pendidikan nasional sistem pendidikan nasional:

- (1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik;
- (2) pemerataan kesempatan belajar;
- (3) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan;
- (4) status kelembagaan;
- (5) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional;
- (6) sumber daya yang belum profesional.

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyempurnaan sistem pendidikan, antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Bila sebelumnya pengelolaan pendidikan merupakan wewenang pusat, maka dengan berlakunya undang-undang tersebut kewenangannya berada pada pemerintah daerah kota/kabupaten. Kantor Dinas Pendidikan Nasional pada tingkat kota/kabupaten dan provinsi harus dapat mempertimbangkan dengan bijaksana kondisi nyata organisasi maupun lingkungannya, dan harus mendukung pula misi pendidikan nasional.

Perubahan seperti tersebut di atas berkaitan dengan kurikulum yang dengan sendirinya menuntut dan mempersyaratkan berbagai perubahan pada komponen-komponen pendidikan lain. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian kelompok pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

### **C. Landasan Yuridis**

Hal-hal yang melandasi perlunya dilakukan kajian ini antara lain adalah sebagai berikut.

#### **1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005**

PP Nomor 19/2005 Pasal 17 Ayat 1 menyebutkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

## **3. Permendiknas 22, 23, dan 24 tahun 2006**

Permendiknas Nomor. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi (SI), Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan Permendiknas Nomor. 24 tentang Pelaksanaan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

## **4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009**

Dalam Rencana Jangka Menengah ini dikatakan bahwa Program pembangunan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2009 diarahkan dalam rangka mewujudkan kondisi yang diharapkan pada tahun 2009, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi semua penduduk, laki-laki dan perempuan, melalui pendidikan formal yaitu SMA, SMK, MA, MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

## **5. Renstra Depdiknas 2000-2009**

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) selaku penanggung jawab sistem pendidikan nasional bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut, diawali dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2000—2009 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Depdiknas menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan nasional serta mengevaluasi hasilnya.

Tahun 2005, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tentang RPJMN Tahun 2004–2009 yang mengamanatkan tiga misi pembangunan nasional, yaitu (1) mewujudkan negara Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan demokratis; dan (3) mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Untuk mewujudkannya, bangsa kita harus menjadi bangsa yang berkualitas, sehingga setiap warga negara mampu meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan daya saing terhadap bangsa lain di era global.

## **D. Tujuan**

Tujuan penyusunan naskah akadekim ini adalah sebagai berikut.

### **1. Tujuan Umum**

Secara umum, naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada BSNP terkait dengan kebijakan pengembangan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan yang harus dilakukan secara berkesinambungan.

## **2. Tujuan Khusus**

Secara khusus, naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada BSNP sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan terhadap dokumen Standar Isi dan pelaksanaannya.

## **BAB II KAJIAN TEORITIS**

Penyempurnaan bagi setiap kebijakan, pada hakikatnya merupakan suatu perubahan, yang seharusnya dilakukan dari waktu ke waktu. Namun, setiap penyempurnaan seringkali disikapi sebagai hal baru yang terkadang dapat menimbulkan perbedaan persepsi bagi setiap pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Fullan (2001) mengatakan, akan timbul perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk setiap perubahan pada sektor pendidikan. Dari sisi pembuat kebijakan, terdapat asumsi bahwa pada umumnya guru-guru sebagai pelaksana kebijakan cenderung kurang menyukai adanya perubahan. Sebaliknya, guru-guru cenderung meyakini bahwa perubahan dimaksud adalah untuk kepentingan pembuat kebijakan dan tidak sepenuhnya didasarkan atas filosofi yang kuat dan jelas mengenai perlunya perubahan. Guru-guru juga meyakini bahwa umumnya pembuat kebijakan kurang memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi pada saat dilaksanakannya proses pembelajaran.

Bennie dan Newstead (1999) menegaskan bahwa setiap perubahan selalu menemui kendala dalam implementasinya. Terkait dengan perubahan kebijakan kurikulum, beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kendala mencakup antara lain waktu, harapan-harapan dari pihak orangtua, kelangkaan bahan pembelajaran termasuk buku-buku pelajaran pada saat implementasi kurikulum yang baru, kekurangjelasan konsep kurikulum yang baru, dan guru-guru kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan dikaitkan dengan kurikulum baru tersebut. Sedangkan Nolder (1990) dan Snyder dkk. (1992) menyatakan bahwa kendala lain menyangkut kemungkinan beban mengajar yang bertambah, peran guru yang berubah sebagai fasilitator, dan sistem pelaporan.

Lebih lanjut Charters dan Jones (1973) menyatakan bahwa setiap perubahan pada sektor pendidikan seharusnya diikuti dengan upaya mengamati berbagai bentuk operasional di lapangan sebagai tindak lanjut dan implikasi dari perubahan kebijakan tersebut. Setiap kendala atau hambatan harus segera diantisipasi sebelum menimbulkan masalah yang besar dan kompleks. Ketidakmampuan mengatasi kendala-kendala tersebut akan menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan atau perubahan tersebut.

Suatu studi menunjukkan bahwa umumnya hambatan yang ditemui dalam implementasi suatu kurikulum adalah kurangnya kompetensi guru-guru. Seringkali terjadi bahwa implementasi suatu kurikulum baru tidak diikuti dengan pertimbangan kemampuan guru dan tindakan bagaimana meningkatkan kemampuan guru-guru sebagai ujung tombak dalam implementasi kurikulum dimaksud (Hargreaves, 1995). Hal ini didukung oleh Fennema dan Franke (1992) yang menyatakan bahwa kemampuan baik secara keterampilan dan pengetahuan seorang guru akan mempengaruhi proses pembelajaran di kelas dan menentukan sejauh mana kurikulum dapat diterapkan.

Studi lain yang dilakukan oleh Taylor dan Vinjevold (1999) mengungkapkan bahwa kegagalan implementasi kurikulum disebabkan oleh rendahnya pengetahuan konseptual guru, kurang penguasaan terhadap topik yang diajarkan, dan kesalahan interpretasi dari apa yang tertulis dalam dokumen kurikulum.

Menurut Middleton (1999), berhasil tidaknya implementasi kurikulum yang diperbaharui cenderung ditentukan oleh persepsi atau keyakinan yang dimiliki oleh guru. Perubahan kurikulum berkaitan dengan perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma baik langsung atau tidak langsung akan memberikan dampak bagi para guru di mana mereka perlu melakukan penyesuaian. Sangat mungkin penyesuaian yang dilakukan akan memberikan ketidaknyamanan lingkungan pembelajaran bagi guru yang bersangkutan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa para guru akan bersikap mendukung implementasi dimaksud apabila mereka memahami kurikulum baru tersebut secara rasional dan praktikal.

Bennie dan Newstead (1999) menyarankan untuk diadakannya penataran bagi guru secara intensif untuk dapat memahami filosofi dan substansi dari kurikulum yang baru. Supaya berhasil, mereka menyarankan agar perubahan kurikulum tidak dilaksanakan lebih dahulu sebelum diperoleh keyakinan secara faktual bahwa para guru benar-benar tahu apa yang seyogianya dilakukan dengan kurikulum yang baru. Dengan kata lain, implementasi suatu kurikulum baru memerlukan waktu dalam proses transisinya.

Menarik untuk mengutip apa yang dikatakan oleh Hawkins dan Kapadia (1984) tentang pengalaman mereka berinteraksi dengan guru untuk implementasi kurikulum yang baru. Dikatakan bahwa kadang-kadang pengembang kurikulum justru menjadi salah satu faktor penghambat. Hal ini disebabkan kenyataan dalam banyak kasus bahwa pengembang kurikulum banyak yang sebenarnya tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mengajar. Padahal mereka dituntut untuk memberikan contoh kepada para guru. Ditemukan oleh Hawkins dan Kapadia beberapa kasus di mana pengembang kurikulum yang berkonsultasi dengan guru-guru di lapangan untuk menemukan strategi mengajar yang tepat untuk topik-topik yang tertulis dalam dokumen kurikulum.

Untuk mengetahui apakah kebijakan baru mengenai kurikulum telah menyebabkan adanya perubahan, dapat dievaluasi oleh setidaknya-tidaknya tiga indikator (Fullan, 2001). *Pertama*, sejauh mana materi-materi baru atau yang direvisi digunakan oleh guru-guru. *Kedua*, sejauh mana pendekatan-pendekatan pengajaran yang baru telah diterapkan dalam proses kegiatan-kegiatan belajar di kelas. *Ketiga*, sejauh mana guru-guru berkeyakinan bahwa kebijakan berdampak kepada perbaikan mutu dan proses pembelajaran. Ketiga indikator tersebut secara bersama-sama akan menentukan tercapai tidaknya tujuan-tujuan perubahan pendidikan.

Berdasarkan berbagai teori tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa yang akan datang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang bersangkutan berani menghadapi, mampu memecahkan, dan berhasil mengatasi masalah kehidupan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pendidikan harus menyentuh potensi nurani maupun potensi kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan tersebut terasa semakin penting, ketika seseorang harus memasuki kehidupan di masyarakat dan dunia kerja.

Pemikiran ini mengandung konsekuensi bahwa penyempurnaan atau perbaikan pendidikan menengah kejuruan untuk mengantisipasi kebutuhan dan tantangan masa depan perlu terus-menerus dilakukan, diselaraskan dengan perkembangan kebutuhan dunia

usaha/dunia industri, perkembangan dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bisnis.

### **BAB III**

#### **TEMUAN KAJIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kajian Dokumen (kerangka kurikulum)**

Berdasarkan hasil kajian terhadap dokumen dan pelaksanaan serta analisisnya, ditemukan hal-hal sebagai berikut.

##### **1. Kelompok Mata Pelajaran dan Struktur Kurikulum**

###### **a. Kelompok Mata Pelajaran**

Uraian tentang kelompok mata pelajaran yang berisi deskripsi kelompok mata pelajaran spesifik SMK, merujuk kepada Permen 22 tahun 2006, meliputi tiga kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok normatif, kelompok adaptif, dan kelompok produktif.

Kelompok normatif adalah kelompok mata pelajaran yang dialokasikan secara tetap yang meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Seni Budaya.

Kelompok adaptif terdiri atas mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi, dan Kewirausahaan.

Kelompok produktif terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang dikelompokkan dalam Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan.

Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai kekhususan. Kekhususan tersebut terletak pada mata pelajaran produktif. Seperti halnya mata pelajaran lain, standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan (SKL) mata pelajaran produktif juga perlu dikaji. Kegiatan kajian diusulkan agar dilakukan dengan melibatkan para guru dan dosen berpengalaman industri, para profesional DU/DI dalam bidangnya serta asosiasi profesi terkait. Pelibatan mantan anggota Kelompok Bidang Keahlian (KBK) pada Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) sangat disarankan. Buram final perlu disebar-luaskan secara terbuka kepada para pemangku kepentingan untuk mendapat masukan. Mengingat KTSP SMK harus mengacu pula pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sedangkan belum semua program keahlian memiliki SKKNI, perlu upaya sinergis dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) untuk penyusunan SKKNI terkait yang belum terbit.

###### **b. Struktur Kurikulum**

Struktur Kurikulum berisi uraian tentang jumlah jam pelajaran setiap matapelajaran, minimal sesuai dengan standar isi untuk semua jenis program/jurusan pada sekolah untuk setiap semester yang berlaku pada tahun pelajaran itu. Standar isi merujuk kepada Permen 22 tahun 2006, merujuk kepada

panduan penyusunan kurikulum KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP.

Struktur Kurikulum yang dituangkan dalam bentuk matrik, memuat tentang nomor, kode kompetensi, kelompok mata pelajaran/kompetensi, tahun/tingkat dan semester serta jumlah jam.

Berdasarkan analisis pelaksanaan di lapangan, penambahan mata pelajaran pada kelompok normatif (Seni Budaya) dan pada kelompok adaptif (Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam) berdampak pada beban belajar peserta didik di sekolah menengah kejuruan di satu sisi, di sisi lain berkurangnya alokasi waktu untuk mata pelajaran produktif. Sehingga beban jumlah jam belajar dengan perbandingan alokasi waktu tatap muka, praktik sekolah dan praktik industri (1:2:4) berimplikasi pada penyediaan waktu lebih banyak dari yang diamanatkan pada standar isi (mengakomodasi jumlah jam perminggu mak. 40 jam)

Oleh karena itu jam real praktik disekolah dan industri harus dihitung serta melakukan penambahan jumlah jam pelajaran lebih dari 4 jam pelajaran untuk memenuhi pencapaian standar kompetensi lulusan

## **2. Muatan lokal (mulok)**

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2004 Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Muatan Lokal.

Menurut Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah terbitan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) tahun 2006, Muatan Lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada, atau materinya terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan.

Muatan Lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahawa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.

Panduan yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK memuat hal-hal sebagai berikut.

Muatan lokal merupakan ciri khas yang memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, misalnya adat istiadat, tata cara, bahasa, kesenian, kerajinan, keterampilan daerah, yang digali untuk memperkaya khasanah budaya dan dapat membangun serta meningkatkan pemikiran, sikap, dan perilaku untuk membentuk pribadi yang efektif guna mencapai sukses sejati sebagai karakter bangsa dan negara Indonesia dalam rangka menunjang kompetensi kejuruan.

Mata pelajaran muatan lokal untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), lebih menitikberatkan pada pengembangan kompetensi yang dapat mendukung ketercapaian kompetensi fungsional ('produktif') sesuai dengan program keahlian.

Kompetensi fungsional adalah kompetensi spesifik yang diperlukan oleh divisi operasional yang sesuai dengan DU/DI. Kompetensi spesifik adalah kompetensi yang berhubungan dengan standar kerja, hal ini berkaitan dengan standar kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD).

Hal ini berarti bahwa pengembangan substansi muatan lokal lebih berorientasi pada kompetensi kejuruan. Padahal, batasan yang diberikan di dalam Permendiknas lebih bersifat universal dan mengacu pada pengembangan manusia seutuhnya.

Bersadarkan kajian tersebut di atas, maka muatan lokal bukanlah nama suatu mata pelajaran tertentu, tetapi merupakan kelompok mata pelajaran atau mata pelajaran yang dikaitkan dengan daerah atau lingkungan tempat tinggal peserta didik. Kemasan mata pelajaran mulok harus mempertimbangkan manfaat untuk peserta didik bukan sebaliknya. Pengenalan daerahnya penting sehingga dia tahu potensi daerahnya, sehingga peserta didik tahu apa yang akan dia kerjakan di masa setelah dia lulus nantinya. Tetapi jangan salah kaprah, sebab banyak orang yang keliru memilih materi mulok, bukan bermanfaat malah menjadi beban.

Salah satu contoh umpamanya, apabila pada daerah itu banyak penenun batik, maka Menenun Batik dijadikan mulok, atau apabila pada suatu daerah terdapat banyak pabrik keramik, maka Pengelolaan dan Pembuatan Keramik menjadi muloknya.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan di lapangan, mulok lebih diposisikan sebagai mata pelajaran “kelas dua” (setara ekstrakurikuler), sehingga tidak ada keharusan bagi mereka untuk mengikutinya. Hal ini dikarenakan penentuan mulok belum didasarkan pada analisis kebutuhan dan minat peserta didik. Untuk mengatasi hal ini cara adalah agar istilah “mulok” dihilangkan dari dokumen laporan prestasi hasil belajar peserta didik, dan langsung ditulis nama mata pelajaran yang diajarkan, atau, langsung diintegrasikan ke dalam kelompok mata pelajaran adaptif.

### **3. Pengembangan Diri**

Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah/madrasah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstra kurikuler. Di samping itu, untuk satuan pendidikan kejuruan, kegiatan pengembangan diri, khususnya pelayanan konseling ditujukan guna pengembangan kreativitas dan karir. Untuk satuan pendidikan khusus, pelayanan konseling menekankan peningkatan kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.

Kegiatan pengembangan diri berupa pelayanan konseling difasilitasi/ dilaksanakan oleh konselor, dan kegiatan ekstra kurikuler dapat dibina oleh konselor, guru dan atau tenaga kependidikan lain sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya. Pengembangan diri yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan ekstra kurikuler dapat mengembangkan kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Materi pengembangan diri mencakup beberapa lintas diklat, seperti agama, BP, PKN, yang dapat dikemas dengan tujuan supaya mereka mempunyai keberanian beradaptasi dengan lingkungan yang baru, pengembangan diri dapat ditumbuhkan dengan

memupuk bakat yang telah dimiliki oleh siswa. Sehingga mereka mempunyai keunggulan, keunggulan membuat mereka percaya diri sehingga dia akan lebih berkembang.

Dalam struktur kurikulum pengembangan diri dikemas dalam Program Bimbingan Konseling dan ekstra kurikuler. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.

Kajian dilapangan menunjukkan bahwa Implementasi Pengembangan diri pelaksanaannya masih parsial, dan belum terintegrasi dengan program Intra. Untuk terpadunya kegiatan pengembangan diri, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan diri peserta didik di SMK melalui antara lain ; Mengintegrasikan kedalam setiap mata pelajaran dan atau dalam bentuk SKKS ( Satuan Kredit Kegiatan Kesiswaan ). SKKS adalah satuan kredit kegiatan kesiswaan dalam jangka waktu tertentu yang diprogramkan untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri peserta didik sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik serta merupakan bentuk pengakuan sekolah.

Kegiatan Pengembangan diri merupakan salah satu jalur pembinaan kegiatan peserta didik yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengusulan beasiswa, pembebasan iuran peserta didik, menjadi pengurus OSIS serta predikat peserta didik terbaik/lulusan terbaik.

Aspek-aspek kegiatan peserta didik yang dapat diperhitungkan nilai kreditnya meliputi ;

1. Aspek keagamaan dan moral Pancasila
2. Aspek penalaran dan idealisme
3. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap sekolah, negara, bangsa dan agama
4. Aspek pemenuhan minat dan bakat peserta didik
5. Aspek kewirausahaan
6. Aspek pengabdian pada masyarakat

#### **4. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global**

Satuan pendidikan dapat melakukan pendidikan berbasis muatan lokal dan global melalui pengintegrasian semua pelajaran dan dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal. Seperti : Penerapan PLC pada pelajaran Produktif (mata pelajaran kejuruan dari program keahlian kelompok Teknologi Industri) yang dapat mengakomodasi implementasi kompetensi dalam penerapan sistem otomatisasi kedaerahan dan berwawasan global.

#### **5. Pendidikan Kecakapan Hidup**

Pendidikan kecakapan hidup berisi uraian tentang penerapan kecakapan akademik, pribadi, sosial, dan kecakapan vokasional. Kecakapan akademik, personal, dan sosial diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Kecakapan vokasional diintegrasikan ke

dalam mata pelajaran kewirausahaan serta unit produksi, berorientasi kedalam produk dan jasa.

Pelaksanaan program kecakapan hidup (*life skill*) dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. tidak berupa mata pelajaran tersendiri
- b. topic pembelajaran yang diajarkan atau dilatihkan kepada siswa, menyatu dan dipadukan dengan topic dan pokok bahasan/materi lain yang ada, dan
- c. pembelajaran kecakapan hidup diposisikan sebagai tujuan tidak langsung dari kurikulum

Program pembelajaran kecakapan hidup disusun dalam dokumen tersendiri tetapi harus merupakan satu kesatuan dengan dokumen kurikulum SMK. (Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2005 : 37-39)

Dalam pelaksanaannya Pendidikan Kecakapan Hidup tertuang dalam pengembangan orientasi kurikulum SMK yang telah mengalami rekonstruksi dan rekulturasasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Orientasi pendidikan dan pelatihan dikembangkan dari azas penyediaan (*supply driven*) menjadi azas permintaan pasar (*market driven*)
- b. Pendidikan dan pelatihan berorientasi pada kecakapan hidup (*life skill*) dan berwawasan lingkungan
- c. Lulusan SMK harus bisa bekerja secara mandiri (wiraswasta) atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada
- d. Penyusunan kurikulum menggunakan pendekatan berbasis luas dan mendasar (*broad based*), berbasis kompetensi (*competency-based*) dan berbasis produksi (*production-based learning*)
- e. Multikurikulum di SMK bagi yang memerlukan
- f. Pola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lebih fleksibel dan permeable, melalui penyediaan multikurikulum, dengan prinsip *multi entry/exit*
- g. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan dengan pola pendidikan system ganda (PSG)
- h. Memberdayakan seluruh potensi masyarakat (orang tua, dunia kerja dan sebagainya)
- i. Bersinergi dengan jenjang dan jenis pendidikan lainnya

## 6. Ujian Nasional

Lulus Ujian Nasional merupakan dambaan bagi setiap siswa tetapi kenapa ujian nasional itu terbatas kepada tiga mata pelajaran saja, seseorang yang pandai Akuntansi atau agama misalnya dia bisa berkiprah di masyarakat . Hanya disebabkan tidak lulus ujian bahasa Indonesia atau matematika, atau bahasa Inggris dia harus menelan pel pahit harus tidak lulus ujian Nasional. Kalau hanya untuk melihat standar mutu cukup melihat hasil ujian nasional tanpa dikaitkan dengan kelulusan. Belum lagi kebijakan bagi peserta didik yang tidak LULUS UN dapat mengikuti UNPK ( Paket C ), maka bagi siswa SMK tidak memiliki relevansi dengan mata pelajaran yang dipelajarai dan yang diujikan karena ada mata uji yang tidak dipelajarai tetapi diujikan, ini merupak suatu kebijakan yang

IRONIS. Dalam upaya untuk mengurangi dampak sebagaimana temuan lapangan diatas, maka Ujian Nasional perlu;

- c. diselenggarakan 2 x setiap tahun (realisasi PP 19/2005) dengan demikian kebijakan Mendiknas mengarahkan peserta didik SMK yg tidak lulus utk mengikuti UNPK (Paket C) tidak diperlukan lagi
- d. POS (prosedur operasi standar) Ujian Nasional diumumkan pada AWAL tahun pelajaran

## B. Kajian Lapangan

### TEMUAN DAN PROBLEMATIKA YANG BERKEMBANG DAN ALTERNATIF SOLUSI

No	Aspek	Permasalahan	Alternatif Pemecahan Masalah
I	Manajemen Kurikulum		
	a. Standar isi	Ada perbedaan persepsi dalam menjabarkan Permen Diknas no. 22 tentang Standar Isi ke dalam silabus	Menyamakan persepsi dalam pengembangan model-model silabus melalui pelatihan dan pendampingan
		Belum adanya standar isi (SK dan KD) yang tetap untuk mata pelajaran produktif (program keahlian) SMK	1) Penyusunan SK dan KD mata pelajaran produktif (program keahlian) SMK dengan mengadaptasi dari isi kurikulum 2004 yang relevan 2) Melakukan <i>sanctioning</i> hasil adaptasi SK dan KD antar kelompok program keahlian
		Penambahan materi pelajaran normatif & adaptif pada struktur kurikulum kurang mendukung materi kejuruan	Melakukan analisis kesesuaian materi normatif & adaptif yang mendukung penguasaan materi kejuruan melalui sinkronisasi normatif, adaptif dan produktif
		Tidak adanya standar isi (SK & KD) untuk mata pelajaran <b>dasar kejuruan</b> yang mendukung program keahlian	Perumusan standar isi (SK & KD) materi dasar kejuruan oleh kelompok guru program keahlian/ BNSP atau direktorat pembinaan SMK

No	Aspek	Permasalahan	Alternatif Pemecahan Masalah
		Beban belajar Perbandingan alokasi waktu tatap muka, praktik sekolah dan praktik industri (1:2:4) berimplikasi pada penyediaan waktu lebih banyak dari yang diamanatkan pada standar isi (mengakomodasi jumlah jam perminggu mak. 40 jam)	Jam real praktik disekolah dan industri harus dihitung  Penambahan jumlah jam pelajaran lebih dari 4 jam pelajaran untuk memenuhi pencapaian standar kompetensi lulusan
	b. Standar kelulusan	Terdapat standar kelulusan yang berbeda antara standar kelulusan ujian nasional dan standar kelulusan mata pelajaran normatif dan adaptif	Sinkronisasi standar kelulusan ujian nasional dan standar kelulusan khususnya pada mata pelajaran normatif dan adaptif melalui peningkatan standar kelulusan ujian secara bertahap
	c. Implementasi Kurikulum	Sebagian warga sekolah belum memahami mengenai standar isi, substansinya dan implementasinya kedalam KTSP	Sosialisasi dan pendampingan yang menyeluruh pada setiap jenjang dan diikuti dengan pelatihan singkat menyusun KTSP, Silabus dan RPP bagi semua guru
		Struktur kurikulum dan beban belajar sbg penjabaran Permen Diknas 22 dianggap masih terlalu sarat beban yang berdampak pada penambahan jam pelajaran untuk ruang lingkup adaptif dan normatif	1). Mengidentifikasi subtansi materi pelajaran adaptif, normatif dan produktif yang benar-benar dibutuhkan 2). Mengintegrasikan subtansi materi mata pelajaran normatif, adaptif dan produktif yang tumpang tindih
	b. Bahan ajar	Belum tercukupinya bahan ajar yang dapat memenuhi standar kompetensi lulusan baik secara kuantitatif, kualitatif dan relevansi	Optimalisasi dan pengadaan bahan ajar yang dapat memenuhi standar kompetensi lulusan melalui 1) pelatihan penyusunan

No	Aspek	Permasalahan	Alternatif Pemecahan Masalah
			bahan ajar 2).menyusun, memodifikasi bahan ajar oleh kelompok guru mata pelajaran masing-masing
	c. Buku referensi	Masih terbatasnya referensi	Pengadaan referensi dan perluas akses informasi
	d. Administrasi dan proses pembelajaran		
	▪ Silabus & RPP	Belum tersusun berdasarkan analisis kebutuhan sekolah dan keunggulan lokal	Melakukan analisis kebutuhan sekolah dan potensi daerah rapat koordinasi dengan instansi terkait
	▪ Kalender akademik	Belum terlaksanakannya kalender akademik dalam memfasilitasi tercapainya standar kompetensi lulusan	Sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemda dalam penyusunan kalender akademik berdasarkan kebutuhan dan tuntutan standar kompetensi lulusan
	▪ Proses Pembelajaran	Belum terlaksana sesuai dengan standar isi, standar proses dan standar kelulusan	1). Pelatihan model-model pembelajaran yang mampu memenuhi SKL 2). Pendampingan 3). Monitoring dan evaluasi
	▪ Assesment / penilaian	Sebagian guru belum melaksanakan sistem penilaian sesuai tuntutan KTSP	Melakukan pelatihan, pendampingan dan monitoring sistem penilaian
<b>II</b>	<b>Organisasi dan Manajemen sekolah</b>		
	a. Organisasi	Belum seluruh sekolah dalam menyusun visi, misi, tujuan dan RENSTRA melibatkan seluruh komponen sekolah	Penyusunan RENSTRA visi, misi, dan tujuan yang melibatkan seluruh komponen sekolah melalui rapat kerja sekolah

No	Aspek	Permasalahan	Alternatif Pemecahan Masalah
	b. Manajemen	Belum menerapkan sistem manajemen mutu atau <i>Quality assurance</i>	Membentuk tim kendali mutu dan merancang sistem manajemen mutu
	c. Keuangan	Keterbatasan dana untuk melakukan penyusunan KTSP, Silabus, RPP	Menggali berbagai sumber dana yang mungkin untuk diakses
	d. Peningkatan mutu	Belum memiliki program peningkatan mutu	Menyusun program peningkatan mutu
	e. Teknologi Informasi	Keterbatasan penguasaan IT dan sarana	Pelatihan IT dan pengadaan alat
III	<b>Ketenagaan</b>		
	a. Kepala Sekolah	Kepala sekolah tidak terbiasa mandiri dalam mengambil keputusan, dan lemah dalam memobilisasi sumber daya sekolah	1) Pelatihan manajemen dan penerapannya 2) Pengembangan wawasan melalui program cangkok atau study banding 3) Membuka fasilitas klinik pengembangan manajemen sekolah melalui elektronik
	b. Guru	Mentalitas guru yang terbiasa menunggu instruksi untuk melaksanakan sesuatu, terbiasa dengan pola seragam dan kurangnya kreativitas	Mendorong guru untuk terbiasa proaktif, melalui pelatihan motivasional, peningkatan kreativitas, pemberian target-target tertentu dan pemanfaatan teknologi informasi
		Guru kurang menguasai dalam menjabarkan standar isi	<i>Up grading, job training</i> , pendampingan, monitoring dan evaluasi
		Keterbatasan guru untuk <b>mata pelajaran baru</b>	Alih fungsi, <i>out sourcing</i> , rangkap tugas, rekrutmen
		Tolok ukur kompetensi guru pada bidang yang diampunya belum terstandar	Mengikuti program sertifikasi guru
	c. Tenaga Kependidikan	Keterbatasan penguasaan IT dan akses informasi	Pelatihan IT, pengadaan alat dan akses informasi

No	Aspek	Permasalahan	Alternatif Pemecahan Masalah
IV.	<b>Sarana Prasarana</b>		
	a. Ruang Belajar	Keterbatasan ruang belajar untuk “ <i>moving class</i> ”	Optimalisasi dan pembangunan ruang kelas baru
	b. Ruang Praktik/lab	Keterbatasan ruang praktik/lab untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan	Optimalisasi dan pembangunan ruang praktik/lab baru untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan
	c. Peralatan Praktik	Keterbatasan fasilitas peralatan untuk memenuhi standar isi dan ketinggalan zaman	1). Optimalisasi, revitalisasi dan penambahan peralatan praktik 2). Melakukan <i>out sourcing</i> dalam optimalisasi penggunaan peralatan
	d. Bahan Ajar dan bahan praktik	Keterbatasan bahan ajar dan bahan praktik sesuai dengan standar isi	Pemenuhan bahan ajar dan bahan praktik serta penyediaan akses informasi/internet
	e. Peralatan Media	Keterbatasan peralatan media	Optimalisasi, revitalisasi dan penambahan peralatan media
	f. Perpustakaan	Keterbatasan jumlah judul, banyak buku, dan akses ke perpustakaan maya	Pengadaan buku, digital library dan akses internet untuk mengakses perpustakaan di luar negeri
V.	<b>Pembiayaan</b>		
	a. Sumber	Alokasi dana anggran pusat dan daerah terbatas	Realisasi amanat UU No. 20 th 2003 ttg Sisdiknas yang mengalokasikan dana sebesar 20 % APBN dan APBD untuk pendidikan <i>diluar gaji pegawai</i>
	b. Alokasi	Ketidak sesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan	Pengalokasian anggaran disesuaikan dengan tuntutan standar isi, proses dan kelulusan

No	Aspek	Permasalahan	Alternatif Pemecahan Masalah
VI.	<b>Peserta Didik</b>		
	a. <i>Input</i>	Kualitas calon siswa relatif rendah dan belum memenuhi standar kelulusan SMP	Melakukan matrikulasi mata pelajaran B. Indonesia dan B. Inggris, Matematika, dan Komputer
	b. <i>Attitude</i>	Tingkat kedisiplinan siswa rendah, tingkat kenakalan tinggi dan penyalahgunaan narkoba	1) Aplikasi mata pelajaran akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepibadian dalam kehidupan sehari-hari 2). Keteladanan dan penerapan aturan disiplin serta konsekuensi pelanggaran disiplin
VII.	<b>Peranserta Masyarakat</b>		
	a. Komite Sekolah	Peran Komite masih terbatas	Peningkatan peran komite dalam penyusunan kurikulum sekolah
	b. Institusi Pasangan	Peran institusi pasangan masih terbatas	Memberdayakan institusi pasangan melalui jaringan kerjasama
VIII	Lingkungan dan Kultur Sekolah	Mentalitas warga sekolah yang terbiasa menunggu instruksi untuk melaksanakan sesuatu, terbiasa dengan pola seragam dan kurangnya kreatifitas	Mendorong warga sekolah untuk terbiasa proaktif, melalui pelatihan motivasional, peningkatan kreativitas, pemberian target-target tertentu dan pemanfaatan teknologi informasi
IX.	Unit Produksi	Belum berfungsi sebagai pendukung pencapaian kompetensi lulusan	Menyusun pola kegiatan unit produksi yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan

## BAB IV

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. SIMPULAN

##### 1. Pendidikan Kejuruan Masa Depan

- a. Peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.
- b. Mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
- c. Bekerja untuk dirinya sendiri (mandiri) maupun untuk orang lain.
- d. Memiliki etos kerja.

##### 2. Kerangka Kurikulum

Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh sekolah. Ini merupakan kebijakan baru dari pemerintah dalam rangka mengakomodasi kepentingan sekolah, daerah dan sekaligus untuk mengembangkan potensi masyarakat. Namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang meliputi antara lain manajemen kurikulum, organisasi dan manajemen sekolah, ketenagaan, sarana prasarana, peserta didik, pembiayaan, peran serta masyarakat, lingkungan dan kultur sekolah, dan unit produksi. Jabaran kendala dalam implementasi kurikulum dalam setiap aspek diperikan sebagai berikut

- a. Aspek manajemen kurikulum
  - 1) Persepsi dalam menjabarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi ke dalam standar kompetensi, kompetensi dasar, dan rencana proses pembelajaran (silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), masih relatif beragam
  - 2) Beban belajar dirasakan sangat berat dengan adanya tuntutan perbandingan alokasi waktu tatap muka, praktik sekolah dan praktik industri adalah 1:2:4
  - 3) Sebagian besar warga sekolah belum memahami secara memadai mengenai standar isi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) secara substantif khususnya dalam implementasi KTSP
  - 4) Belum tersusun KTSP yang berdasarkan hasil analisis kebutuhan sekolah dan hasil analisis keunggulan lokal (potensi daerah).
- b. Aspek organisasi dan manajemen sekolah
  - 1) Belum memadainya wawasan tentang manajemen penjaminan mutu (*Quality Assurance*) sehingga belum dapat menyusun program-program peningkatan mutu sekolah secara komprehensif
  - 2) Masih terbatasnya sarana prasana dan penguasaan teknologi informasi oleh seluruh komponen sekolah.
- c. Aspek ketenagaan
  - 1) Sebagiaian besar guru masih kurang memahami standar isi yang harus dijabarkan dalam pengembangan kurikulum tingkat intruksional, operasional dan eksperensial.

- 2) Adanya keterbatasan jumlah tenaga pengajar/guru untuk mengampuh mata pelajaran baru antara lain Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), seni budaya dan muatan lokal
- d. Aspek sarana dan prasarana
- 1) Adanya keterbatasan jumlah, kualitas dan relevansi fasilitas pembelajaran khususnya mata pelajaran produktif bila dikaitkan terhadap tuntutan pemenuhan standar isi dan perkembangan Ipteks.
  - 2) Adanya keterbatasan jumlah judul, banyak buku, dan keluasan akses dalam penggunaan virtual library (perpustakaan maya)
  - 3) Adanya keterbatasan jumlah ruang kelas bila dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar dan tuntutan pelaksanaan pembelajaran *moving class*.
- e. Aspek peserta didik
- 1) Tingkat kemampuan bekal ajar siswa yang masuk ke SMK seberapa besar masih relatif rendah bila dilihat dari prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan program keahlian yang dipilih.
  - 2) Tingkat kedisiplinan sebagian siswa SMK masih relatif rendah, hal ini ditunjukkan oleh tingginya tingkat kenakalan dan penyalahgunaan narkoba.
- f. Aspek pembiayaan
- 1) Besarnya alokasi anggaran untuk operasional sekolah sesuai dengan tuntutan KTSP baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih relatif terbatas.
  - 2) Relevansi alokasi anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih relatif rendah bila dikaitkan dengan tuntutan pelaksanaan standar isi, standar proses dan standar kelulusan.
  - 3) Kepedulian dan kemampuan masyarakat dalam peran sertanya yang terkait dengan pembiayaan pendidikan masih relatif rendah.
- g. Aspek peran serta masyarakat
- 1) Peran serta institusi pasangan (dunia usaha dan dunia industri) dalam pelaksanaan pembelajaran untuk bidang produktif masih relatif rendah bila dikaitkan dengan tuntutan pelaksanaan standar isi, standar proses dan standar kelulusan.
  - 2) Jaringan kerjasama antara sekolah dan institusi pasangan (dunia usaha dan dunia industri) dalam upaya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber belajar sesuai dengan tuntutan pelaksanaan standar isi, standar proses dan standar kelulusan masih relatif rendah.
- h. Aspek lingkungan dan kultur sekolah
- 1) Adanya sebagian warga sekolah (pendidik dan tenaga kependidikan) yang masih relatif belum memiliki kemandirian/otoritas profesional dalam menjalankan perannya melaksanakan KTSP sesuai dengan tuntutan, jiwa dan karakteristik dari kurikulum tersebut.
  - 2) Adanya sebagian warga sekolah (pendidik dan tenaga kependidikan) yang masih terbiasa menunggu instruksi untuk melaksanakan sesuatu, terbiasa

dengan pola seragam dan kurang kreatif dalam menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan KTSP.

- i. Aspek unit produksi
  - 1) Belum berfungsinya secara optimal baik secara kuantitas, kualitas dan relevansi keberadaan unit produksi di sekolah bila dikaitkan dengan upaya sebagai pendukung penguatan pelaksanaan standar isi, standar proses dan standar kelulusan.
  - 2) Belum optimalnya pengelolaan unit produksi di sekolah bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip wirausaha yang lebih berorientasi pada kemandirian, pelaksanaan *teaching industry* dan memberikan *income generating* bagi pemberdayaan dan penguatan lembaga sekolah dalam memenuhi tuntutan pelaksanaan KTSP.

## B. REKOMENDASI

### a. Jangka Pendek

1. Struktur kurikulum SMK (lampiran Permendiknas no. 22 tahun 2006) yang mencantumkan tiga kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok normatif, kelompok adaptif, dan kelompok produktif, dipandang sangat tepat dan tidak perlu diubah. Namun demikian, secara berkala (misalnya tiap 5 tahun) perlu dilakukan kaji ulang terhadap Standar Isi, kecuali untuk TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) perlu dilakukan kaji ulang tiap **3** (tiga) tahun.
2. Standar Isi
  - a) Perlu segera dilakukan penajaman rumusan Standar Isi kelompok mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif, di samping kajian tentang muatan isi dan sinkronisasi antarkelompok mata pelajaran, sehingga setiap mata pelajaran tidak terlihat berdiri sendiri.  
  
Misalnya, perlu dikaji ulang materi matematika untuk SMK Kelompok Seni dan Pertunjukan agar dibedakan dari kelompok lainnya.
  - b) Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mata pelajaran produktif juga perlu dikaji, melibatkan para guru dan dosen berpengalaman industri, para profesional DU/DI dalam bidangnya serta asosiasi profesi terkait.
  - c) Belum semua program keahlian memiliki SKKNI, perlu upaya sinergis dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) untuk penyusunan SKKNI terkait yang belum terbit.
3. Beban Belajar  
  
Sehubungan dengan peningkatan mutu pendidikan SMK, mengingat penambahan mata pelajaran pada kelompok Normatif dan Adaptif, khususnya IPA, IPS, Seni Budaya, dan Mulok dirasakan memberatkan beban belajar para peserta didik, perlu **segera** dilakukan kajian terhadap kelompok tersebut terkait dengan isi materi, kesiapan dan keterbatasan tenaga guru, metode penyampaian, dan fasilitas.

#### 4. Ujian Nasional

- a) Diselenggarakan 2 x setiap tahun (realisasi PP 19/2005). Dengan demikian kebijakan Mendiknas mengarahkan peserta didik SMK yang tidak lulus untuk mengikuti UNPK (Paket C) tidak diperlukan lagi.
  - b) Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan UN bagi peserta didik yang dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan pada akhir semester 4 banyak manfaatnya, a.l. memberi peluang peserta didik melakukan prakerin pada semester 5 dan/atau 6 secara penuh. Di sisi lain PP .
  - c) POS (prosedur operasi standar) dan SKL Ujian Nasional diumumkan pada AWAL tahun pelajaran
  - d) Realisasi konversi skor UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) dan TOEIC (*Test of English for International Communication*) menjadi nilai UN peserta didik.
  - e) Penyusunan SKL UN, khususnya jangan seperti yang terjadi pada soal UN Matematika thn 2006/2007, idealnya memperhatikan Standar Kelulusan Kelompok / Program Keahlian, setidaknya seperti awal tahun 2000an.
5. Direkomendasikan agar guru SMK program keahlian yang tidak terdapat pada lembaga pendidikan tinggi keguruan, seperti pedalangan, karawitan, geologi, pertambangan, pertanian, peternakan, teater, animasi, dan sebagainya agar dapat direkrut dari tamatan lembaga pendidikan tinggi nonkeguruan dengan catatan agar yang bersangkutan sambil bertugas berkewajiban mendapat Akta IV.

#### b. Jangka Panjang

##### 1. Kurikulum Kejuruan Masa Depan

- a. Rumusan ketentuan pada UU Sisdiknas agar hanya memuat esensi tujuan pendidikan. Mata pelajaran cukup diatur dalam Permen.
- b. Pengelompokan mata pelajaran ke dalam kelompok Normatif, Adaptif, dan Produktif dipertahankan.
- c. Menyederhanakan jumlah mata pelajaran, tanpa mengurangi esensi kurikulum.
- d. Mempertajam SKL sesuai profil tamatan.
- e. Secara bertahap diupayakan agar terwujud pembelajaran berbasis produksi
- f. Pembelajaran yang seimbang antara di "sekolah" dan di "dunia kerja".
- g. Pemberian dasar yang kuat di sekolah  $\Rightarrow$  Dasar Kompetensi.
- h. Mengacu pada keperluan kompetensi kerja di dunia kerja yang berubah sangat cepat perlu dilakukan *need assesment*.
- i. Pembentukan sikap kerja berbasis budaya kerja industri.
- j. Perlu pemetaan pembelajaran berbasis TIK menggunakan fasilitas JARDIKNAS
- k. Lama belajar disesuaikan dengan pencapaian kompetensi.
- l. Perubahan yang terjadi mohon direncanakan secara baik dan berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada tingkat pelaksana.

2. Kegiatan sosialisasi tak hanya dilakukan pada sebatas seminar, lokakarya, workshop tetapi sampai dengan pendampingan sebagai real action dalam penyusunan KTSP ditingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan dapat melibatkan unsur pusat kurikulum, direktorat terkait, dinas pendidikan setempat maupun tim pengembang kurikulum di tiap-tiap propinsi dan kotamadya/kabupaten
3. Dinas Pendidikan Propinsi atau Kota perlu memfasilitasi dan memberikan pendampingan dalam penyusunan dan pengembangan KTSP pada satuan pendidikan sesuai dengan standar Nasional Pendidikan
4. Sebagai upaya memfasilitasi percepatan penguatan tingkat pemahaman, wawasan dan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMK perlu diberikan beberapa rekomendasi. Rekomendasi ini disusun berdasarkan temuan-temuan kajian pelaksanaan standar isi, standar kompetensi, kompetensi dasar mata pelajaran dan standar kompetensi lulusan. Beberapa rekomendasi yang dapat memfasilitasi implementasi alternatif pemecahan masalah yang telah di berikan dalam tabel permasalahan dan alternatif pemecahan pelaksanaan KTSP di atas, perlu dilakukan penguatan pada aspek-aspek sebagai berikut.
5. Manajemen kurikulum, organisasi dan manajemen sekolah dan pembiayaan melalui kegiatan peningkatan wawasan warga sekolah (pendidik dan tenaga kependidikan) terhadap kebijakan implementasi KTSP dalam bentuk *workshop* kurikulum, *On The Job Training*, *In House Training*, monitoring dan program pendampingan yang difasilitasi baik pengembangn program, narasumber maupun pembiayaannya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6. SDM sekolah (pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik) melalui (1) program peningkatan kualifikasi dan setifikasi guru, (2) pelatihan-pelatihan untuk pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi informasi, dan (3) program matrikulasi bagi peserta didik pada mata pelajaran tertentu (Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan Komputer).
7. Sarana dan prasarana melalui pemenuhan kebutuhan secara bertahap dan sistematis sesuai dengan tuntutan standar sarana dan prasarana pendidikan dalam PP 19 Tahun 2005 dengan memberdayakan peranserta masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8. Lingkungan sekolah dan unit produksi melalui (1) penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif dan menerapkan program 7K (ketertiban, keamanan kebersihan, keindahan, kerindangan, kenyamanan dan kekeluargaan) dan (2) mendorong tumbuh kembangnya unit produksi di SMK sebagai tempat *teaching factory* atau *teaching industry*.
9. Peran serta masyarakat melalui pemberdayaan (1) dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan kegiatan praktik kerja industri (prakerind) siswa, outsourcing, program magang guru dan validasi dan sinkronisasi KTSP dan (2) komite sekolah dalam meningkatkan peran serta masyarakat secara lebih optimal, sehingga terjadi sinergi positif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat (industri dan nonindustri) dalam mendukung optimalisasi implementasi KTSP di SMK.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Bennie, K. & Newstead, K. 1999. "Obstacles to implementing a new curriculum." dalam M.J. Smith & A.S. Jordaan (Eds.) *Proceedings of the National Subject Didactics Symposium* (pp. 150-157). Stellenbosch: University of Stellenbosch.
2. Charters, W. & Jones, J. (1973). *On the neglect of the independent variable in program evaluation*. Unpublished paper. Eugene: University of Oregon.
3. Fennema, E. & Franke, M.L. 1992. "Teachers' knowledge and its impact." Dalam Grouws, D.A. (Ed.). *Handbook of research on mathematics teaching and learning* (pp. 147-164). New York, United States: MacMillan.
4. Fullan, M.G. 2001. *The new meaning of educational change*. London: Routledge Falmer.
5. Hargreaves, A. 1995. *A changing teachers, changing times*. New York, NY: Teachers College Press.
6. Hawkins, A.S. & Kapadia, R. 1984. "Children's conceptions of probability—A psychological and pedagogical review." *Educational Studies in Mathematics*, 15, 349-377.
7. Middleton, S. 1999. *Between a rock and shifting sands: Issues of curriculum implementation in secondary schools*. Paper disajikan dalam "The Telecom Technology Education Conference", Kings College, Auckland, New Zealand, 16 April 1999.
8. Nolder, R. 1990. "Accommodating curriculum change in mathematics: Teachers' dilemmas." dalam Booker, G., Cobb, P. & de Mendicuti, T.N. (Eds.). *Proceedings of the Fourteenth Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (pp. 167-174). Mexico City, Mexico.
9. Taylor, N. & Vinjevold, P. 1999. *Getting learning right: Report of the President's Education Initiative Research Project*. Johannesburg, South Africa: Joint Education Trust.